



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1163/SEK/OT.01.1/8/2019
Lampiran: 6 (enam) Lembar
Hal : Undangan

1 Agustus 2019

Yth. (Daftar Nama Pejabat Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 perihal Pengajuan Unit Kerja Berperedikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1137/SEK/OT.01.1/7/2019 perihal Ijin dan Usul Tambahan Satuan Kerja/Pengadilan Untuk Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta menindaklanjuti surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/22/RB.04/2019 perihal Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka akan diadakan Evaluasi Lanjutan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu s.d Jum'at, 7 s.d 9 Agustus 2019

Waktu : 14.30 WIB s.d selesai (*jadwal acara terlampir*)

Tempat : Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta Baycity, Pantai Indah, Ancol Pademangan, Jakarta

Berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas dan demi kelancaran persiapan dan pelaksanaannya, maka diminta Saudara untuk memperhatikan ketentuan yang tercantum pada Lampiran II surat undangan ini.

Disampaikan juga bahwa segala biaya yang timbul dari kegiatan Evaluasi Lanjutan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung,

S. Panjoharsoyo

Contact Person: Sadik Rafi'i (081318862862)
Tiroi Siahaan (0811171259)

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.

Daftar Nama Pejabat

Lingkungan Peradilan Umum Sebanyak 96 Unit Kerja

- 1 Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
- 2 Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
- 3 Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- 4 Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
- 5 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
- 8 Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
- 9 Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
- 10 Ketua Pengadilan Tinggi Manado
- 11 Ketua Pengadilan Tinggi Medan
- 12 Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
- 13 Ketua Pengadilan Tinggi Padang
- 14 Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
- 15 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
- 16 Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
- 17 Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
- 18 Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
- 19 Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
- 20 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- 21 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
- 22 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
- 23 Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- 24 Ketua Pengadilan Negeri Ambon
- 25 Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
- 26 Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
- 27 Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
- 28 Ketua Pengadilan Negeri Bandung
- 29 Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
- 30 Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi
- 31 Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau
- 32 Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
- 33 Ketua Pengadilan Negeri Bitung
- 34 Ketua Pengadilan Negeri Blora
- 35 Ketua Pengadilan Negeri Bogor
- 36 Ketua Pengadilan Negeri Demak
- 37 Ketua Pengadilan Negeri Depok
- 38 Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
- 39 Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
- 40 Ketua Pengadilan Negeri Gresik
- 41 Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
- 42 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- 43 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- 44 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- 45 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- 46 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- 47 Ketua Pengadilan Negeri Jambi
- 48 Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung
- 49 Ketua Pengadilan Negeri Kediri
- 50 Ketua Pengadilan Negeri Semarang
- 51 Ketua Pengadilan Negeri Kendari
- 52 Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang
- 53 Ketua Pengadilan Negeri Langsa
- 54 Ketua Pengadilan Negeri Makassar
- 55 Ketua Pengadilan Negeri Malang
- 56 Ketua Pengadilan Negeri Manado
- 57 Ketua Pengadilan Negeri Martapura
- 58 Ketua Pengadilan Negeri Masohi
- 59 Ketua Pengadilan Negeri Mataram
- 60 Ketua Pengadilan Negeri Medan
- 61 Ketua Pengadilan Negeri Mempawah
- 62 Ketua Pengadilan Negeri Metro
- 63 Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
- 64 Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
- 65 Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi
- 66 Ketua Pengadilan Negeri Padang
- 67 Ketua Pengadilan Negeri Palembang
- 68 Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
- 69 Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare
- 70 Ketua Pengadilan Negeri Pati
- 71 Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 72 Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- 73 Ketua Pengadilan Negeri Praya
- 74 Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
- 75 Ketua Pengadilan Negeri Sampit
- 76 Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
- 77 Ketua Pengadilan Negeri Sengeti
- 78 Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
- 79 Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
- 80 Ketua Pengadilan Negeri Singkawang
- 81 Ketua Pengadilan Negeri Soa Sio
- 82 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
- 83 Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
- 84 Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
- 85 Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
- 86 Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
- 87 Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang
- 88 Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
- 89 Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta
- 90 Ketua Pengadilan Negeri Tondano
- 91 Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung
- 92 Ketua Pengadilan Negeri Wates
- 93 Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 94 Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
- 95 Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
- 96 Ketua Pengadilan Negeri Klaten

Lingkungan Peradilan Agama sebanyak 59 Unit Kerja

- 1 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
- 2 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
- 3 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- 4 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
- 5 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
- 8 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang
- 9 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
- 10 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
- 11 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
- 12 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
- 13 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
- 14 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
- 15 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
- 16 Ketua Mahkamah Syariah Aceh
- 17 Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
- 18 Ketua Pengadilan Agama Bandung
- 19 Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru
- 20 Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin
- 21 Ketua Pengadilan Agama Bantul
- 22 Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi
- 23 Ketua Pengadilan Agama Batam
- 24 Ketua Pengadilan Agama Cikarang
- 25 Ketua Pengadilan Agama Blitar
- 26 Ketua Pengadilan Agama Depok
- 27 Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
- 28 Ketua Pengadilan Agama Indramayu
- 29 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- 30 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan
- 31 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur
- 32 Ketua Pengadilan Agama Jambi
- 33 Ketua Pengadilan Agama Kab Kediri
- 34 Ketua Pengadilan Agama Kendari
- 35 Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi
- 36 Ketua Pengadilan Agama Kupang
- 37 Ketua Pengadilan Agama Lamongan
- 38 Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung
- 39 Ketua Pengadilan Agama Makassar
- 40 Ketua Pengadilan Agama Martapura
- 41 Ketua Pengadilan Agama Mataram
- 42 Ketua Pengadilan Agama Mojokerto
- 43 Ketua Pengadilan Agama Palu
- 44 Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
- 45 Ketua Pengadilan Agama Pontianak
- 46 Ketua Pengadilan Agama Probolinggo
- 47 Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
- 48 Ketua Pengadilan Agama Samarinda
- 49 Ketua Pengadilan Agama Sampit
- 50 Ketua Pengadilan Agama Semarang
- 51 Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

- 52 Ketua Pengadilan Agama Situbondo
- 53 Ketua Pengadilan Agama Soasio
- 54 Ketua Pengadilan Agama Stabat
- 55 Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar
- 56 Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
- 57 Ketua Pengadilan Agama Surakarta
- 58 Ketua Pengadilan Agama Tangerang
- 59 Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Lingkungan Peradilan Militer Sebanyak 10 Unit Kerja

- 1 Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta
- 2 Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan
- 3 Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
- 4 Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
- 5 Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang
- 6 Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
- 7 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- 8 Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- 9 Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya
- 10 Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Sebanyak 12 Unit Kerja

- 1 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- 2 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
- 3 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
- 4 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- 5 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
- 6 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
- 7 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
- 8 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
- 9 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
- 10 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
- 11 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
- 12 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Daftar nama Peserta, NIP dan Jabatan yang mengikuti kegiatan tersebut dikirim ke alamat *e-mail* ortala.perencanaan@gmail.com paling lambat 5 Agustus 2019;
2. *Check in* peserta: Rabu 7 Agustus 2019 Pukul 10:00 - 14:30 WIB;
3. *Check out* peserta: Jum'at 9 Agustus 2019 Pukul 12:00 WIB;
4. Ketentuan tiket :
 - a. rute penerbangan PP asal pengadilan – Jakarta
 - b. tiket pesawat dibayarkan hanya untuk kelas ekonomi;
 - c. apabila diluar ketentuan huruf a dan b dibebankan pada peserta
5. Biaya tiket pesawat PP, transportasi, penginapan dan uang harian peserta dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019;
6. Melampirkan *boarding pass* pesawat berangkat, tiket pesawat PP dan surat tugas;
7. Mempersiapkan presentasi untuk Ketua Pengadilan;
8. Membawa *laptop*, data dukung dan LKE PMPRB;
9. Selama kegiatan berlangsung pakaian batik.

Catatan :

- PP (Pulang Pergi).
- LKE PMPRB (Lembar Kerja Elektronik Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi).

**JADWAL ACARA EVALUASI LANJUTAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA TAHUN 2019
RABU, 7 AGUSTUS 2019 S.D. JUMAT, 9 AGUSTUS 2019**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
HARI I Rabu, 7 Agustus 2019			
1	10:00 - 14:30	Registrasi Peserta	Panitia
2	14:30 - 14:35	PEMBUKAAN: Lagu Indonesia Raya	MC & dlrigen: Ida Ariani, Staf Biro Perencanaan dan Organisasi
	14:35 - 14:40	Pembacaan Doa	Rizqi Widi Feirdiani, Staf Biro Perencanaan dan Organisasi
	14:40 - 14:50	Laporan Ketua Panitia	Bapak Arifin Samsurijal, Kepala Bagian Rencana dan Program
	14:50 - 15:50	Sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi	Bapak Sunarto, YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
3	15:50 - 16:00	Coffee Break	
4	16:00 - 17:00	Diskusi Panel: - Arti Penting Komitmen dan Peran Pimpinan dalam Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Pada Unit Kerja - Pembangunan Zona Integritas pada Badan Peradilan	Narasumber internal: Bapak A. S. Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung Bapak Made Rawa Aryawan, Panitera Mahkamah Agung Bapak Herri Swantoro, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Aco Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Bapak Nugroho Setiadji, Kepala Badan Pengawasan Bapak Zarof Ricar, Kepala Balltbang Diklat Kumdil Narasumber eksternal: Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB Bapak Adl Lumaksono, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
5	17:00 - 19:30	Ishoma	
6	19:30 - 20:30	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan Evaluasinya pada Kementerian/Lembaga	Narasumber: Kementerian PANRB Moderator: Ibu Jeanny H. V. Hutauruk, Sekretaris Ditjen. Badimiltun
7	20:30 - 20:45	Coffee Break	
8	20:45 - 23:00	Evaluasi Lanjutan Pembangunan Zona Integritas Pada 177 Pengadilan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Tim Penilai Nasional (Tim Kementerian PANRB)
HARI II Kamis, 8 Agustus 2019			
1	8:30 - 10:00	Pemaparan mengenai Pelaksanaan Survei Eksternal sebagai Salah Satu Persyaratan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja	Narasumber: Tim Badan Pusat Statistik Moderator: Bapak Joko Upoyo Pribadi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
2	10:00 - 10:15	Coffee Break	
3	10:15 - 11:45	Lanjutan Pemaparan mengenai Pelaksanaan Survei Eksternal sebagai Salah Satu Persyaratan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja	Narasumber: Tim Badan Pusat Statistik Moderator: Bapak Joko Upoyo Pribadi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
4	11:45 - 13:30	Ishoma	
5	13:30 - 15:00	Pemaparan - Teknik dan Materi Presentasi Pembangunan Zona Integritas Pada Unit Kerja - Strategi Menghadapi Survei Eksternal	Narasumber: Ibu Jeanny H. V. Hutauruk, Sekretaris Ditjen. Badimiltun Moderator: Bapak Edi Yuniadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
6	15:00 - 16:30	Pemaparan mengenai Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Badan Peradilan	Narasumber: Bapak Wahyudin, Sekretaris Ditjen. Badilum Bapak Arif Hidayat, Sekretaris Ditjen Badilag Ibu Jeanny H. V. Hutauruk, Sekretaris Ditjen. Badimiltun Bapak Andl Kurniawan, Sekretaris Badan Pengawasan Moderator: Bapak Edi Yuniadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
7	16:30 - 16:45	Coffee Break	
8	16:45 - 17:45	Pemaparan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas pada 177 Pengadilan Sebagai Calon Unit Kerja Berpredikat WBK di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Tim Penilai Internal Mahkamah Agung
9	17:45 - 19:30	Ishoma	
10	19:30 - 23:00	Evaluasi Lanjutan Pembangunan Zona Integritas Pada 177 Pengadilan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Tim Penilai Nasional (Tim Kementerian PANRB)
HARI III Jumat, 9 Agustus 2019			
1	8:30 - 10:30	Evaluasi Lanjutan Pembangunan Zona Integritas Pada 177 Pengadilan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Tim Penilai Nasional (Tim Kementerian PANRB)
2	10:30 - 11:15	Diskusi dan Kesimpulan	Pokja Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
3	11:15 - 11:20	PENUTUPAN: Lagu Bagimu Negeri	MC & dlrigen: Ida Ariani, Staf Biro Perencanaan dan Organisasi
	11:20 - 11:25	Pembacaan Doa	Rizqi Widi Feirdiani, Staf Biro Perencanaan dan Organisasi
	11:25 - 11:35	Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Ketua Panitia	Bapak Arifin Samsurijal, Kepala Bagian Rencana dan Program
	11:35 - 11:45	Penutupan secara resmi	Bapak Joko Upoyo, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi